



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAHMADA

Mendukung Keistimewaan Yogyakarta

MELALUI PERSPEKTIF KEILMUAN MULTIDISIPLIN GUNA MEMBANGUN KEMANDIRIAN BANGSA

Tim Reviewer

- Prof. Dr. Hartono, DEA., DESS.
- Prof. Ir. Suryo Purwono, MA.Sc., Ph.D.
- Prof. Dr. Syamsul Hadi, SU
- Prof. Dr. M. Baiquni, MA
- Dr. Wening Udasmoro, DEA
- Dr. Ir. Donny Widianto, M.Sc.

Penyelaras Bahasa: **Pradiastuti Purwitorosari, S.S.**

**Mendukung Keistimewaan Yogyakarta
Melalui Perspektif Keilmuan Multidisiplin Guna
Membangun Kemandirian Bangsa**

- Reviewer : Prof. Dr. Hartono, DEA., DESS
Prof. Ir. Suryo Purwono, MA.Sc., Ph.D
Prof. Dr. Syamsul Hadi, SU
Prof. Dr. M. Baiquni, M.A
Dr. Wening Udasmoro, DEA
Dr. Ir. Donny Widiyanto, M.Sc
- Penyelaras Bahasa : Pradiastuti Purwitorosari, SS
- Desain Cover : Rudi Widodo, M.Kom
- Layouter : Tim Kreatif Lintang Pustaka Utama
- Cetakan I : Oktober, 2014
- Penerbit : Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Anggota IKAPI 077/DIY/2012
- Alamat : Jl. Teknik Utara, Pogung, Sleman, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 564239, Fax. (0274) 564239
- Email : sps@ugm.ac.id
- Website : <http://pasca.ugm.ac.id>
- ISBN : 978-602-8683-02-9

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotocopy, tanpa izin tertulis dari penerbit dan atau penulis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ISTIMEWA DALAM PARADOKS: MENELISIK KEARIFAN LOKAL UNTUK INFRASTRUKTUR KEBUDAYAAN.....	1
<i>Purwo Santoso</i>	
PERAN KEARIFAN LOKAL KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT DALAM PENGELOLAAN KERAGAMAN	25
<i>Samsul Maarif</i> <i>Ridbo Afifuddin</i> <i>Ranto Praja H.</i>	
PENDIDIKAN KARAKTER KHAS YOGYAKARTA: TANTANGAN BAGI DUNIA PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT.....	47
<i>Dicky Sofjan</i> <i>Jeanny Dbewayani</i> <i>Rahmadi Agus Setiawan</i>	
DINAMIKA PERSEPSI NILAI LUHUR KEJAWAAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KONTEKS HUBUNGAN ANTAR-IMAN	81
<i>Siti Syamsiyatun</i> <i>Leonard C. Epafra</i> <i>Hendrikus Paulus Kaunang</i>	

MODEL HUBUNGAN TINGKAT PERKEMBANGAN
WILAYAH DAN POTENSI RISIKO BENCANA
DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA..... 117
Lutfi Muta'ali

PENERAPAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN
HIDUP (IKLH) DENGAN INDEKS PERSEPSI
KESIAPSIAGAAN PERUBAHAN LINGKUNGAN
DAN IKLIM (IPKPL) DALAM UPAYA PENDIDIKAN
JASA LINGKUNGAN STUDI KASUS SMU, SMP,
DAN SD SEKITAR KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA..... 137
Slamet Suprayogi
Tommy Andryan Tivianton
Dinda Mukarromah
Widiyastuti Nurhayati

STRUKTUR POLA RUANG KEPARIWISATAAN DI
DALAM DIMENSI FISIKAL NON FISIKAL DI
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 165
Mubamad

MODAL SOSIAL *CIVIC LIFE* DI YOGYAKARTA
KAJIAN ATAS PERAN KOMUNITAS PEDAGANG
KAKI LIMA MALIOBORO, SEPEDA ONTEL,
DAN YAYASAN PERSAUDARAAN MASYARAKAT
JOGYA..... 177
Mobammad Iqbal Abnaf
Paulus Widiyanta
Yuyun Wardatul 'Uyun

PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN
ATRAKSI PARIWISATA GOA PINDUL
KABUPATEN GUNUNG KIDUL..... 205
Janianton Damanik dan Destha T. Rabarjana



STRATEGI PEMBERDAYAAN PETANI DALAM ADOPSI INOVASI DAN PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI BAWANG MERAH DI LAHAN PASIR PANTAI KABUPATEN BANTUL.....	233
<i>Mudiyono</i>	
<i>Sunarru Samsi Hariadi</i>	
<i>Roso Witjaksono</i>	
PENGEMBANGAN USAHA TANI LAHAN PASIR PANTAI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MELALUI MANAJEMEN INFRASTRUKTUR PERTANIAN, PENGUATAN KAPASITAS, DAN LOGISTIK KOMERSIAL.....	251
<i>Sunyoto Usman</i>	
<i>Aksan Susanto</i>	
<i>Theodorik Rizal Manik</i>	
PEMETAAN USAHATANI, ADOPSI, DAN DIFUSI TEKNOLOGI BUDIDAYA SORGUM SEBAGAI SUMBER PANGAN ALTERNATIF DI LAHAN MARGINAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	285
<i>Subejo</i>	
<i>Arta Kusumaningrum</i>	
<i>Irham</i>	
<i>Fatkbiyab Robmah</i>	
KAJIAN GEOGRAFIS POTENSI KEKERINGAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	305
<i>Junun Sartohadi</i>	
<i>Suyono</i>	
<i>Bambang Hargono</i>	
<i>Arum Puspitorukmi</i>	
SOCIAL PROTECTION FOR WOMEN IN THE INFORMAL SECTOR THE NEXUS OF POVERTY, THE WORK OF CARE, AND PAID WORK.....	325
<i>Dewi Haryani Susilastuti dan Kuncoro Cabyo Adi</i>	

PERANCANGAN WADUK PENAMPUNGAN DI LEMBAH UGM UNTUK MENGENDALIKAN BANJIR KALI BELIK KOTA YOGYAKARTA	359
<i>M. Pramono Hadi</i>	
<i>Fitria Nucifera</i>	
<i>Matien Cbajar D.</i>	
EKOREGION WILAYAH KEPESISIRAN DAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN DI SEGARA ANAKAN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH	375
<i>Langgeng Wabyu Santosa</i>	
PENGEMBANGAN METODE DAN PIRANTI AUDIT PENGGUNAAN GEDUNG DAN RUANG PERKULIAHAN	405
<i>Singgib Hawibowo</i>	
<i>Sabid Susanto</i>	
<i>Ika Putra</i>	
<i>Chandra Setyawan</i>	
<i>Sri Mulyani</i>	
<i>Anjar Safitri</i>	
<i>Megawanti</i>	
<i>Binsar T. Gultom.</i>	
INDEKS	417
BIODATA PENULIS.....	427

DINAMIKA PERSEPSI NILAI LUHUR KEJAWAAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KONTEKS HUBUNGAN ANTAR-IMAN

*Siti Syamsiyatun, Leonard C. Epafra,
dan Hendrikus Paulus Kaunang*

Program Studi Inter-Religious Studies
Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Email: siti.syamsiyatun@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to capture the dynamics and shift of Javanese's values as understood by the Yogyakarta society. As an autonomous and special region within the frame of the Republic of Indonesia, Yogyakarta perceived as a multicultural and cosmopolitan space that distinct, tolerant, and endorses pluralism. This image is appeared in political rhetoric as in daily conversation. The outcome of the research showed a strong opinion among the members of Yogyakarta society that there is a massive shift of value in the society. This is a signal of a tension and dynamic between the aforementioned image and the aspiration to preserve the noble values, which considered as the kernel of Yogyakarta's identity. Along with it, there is also a faith that Yogyakarta's culture is elastic enough to take such multiculturalistic burdens and consequences. In contrast, there is also a concern of the massive erosion of those values by modernity, by the shift of demographic arrangement (the increasing of migrants), and by the increasing of the politics of identity, including religious identity. Take this within the larger context of national and transnational frameworks in this paper the researchers argued that Yogyakarta still has an opportunity to overcome the above burdens. The components of society could keep the equilibrium among those tensions, and managing it in creative way, including in the interfaith interaction. Moreover, through this dynamics the meaning of "uniqueness" in "Keistimewaan Yogyakarta" (the uniqueness of Yogyakarta) is in making and maintaining. Within this framework all the nostalgic references and values are in the process of transformation into new cultural values. All in all, this process should be considered transitional and the end process is still in waiting.

Keywords: *Uniqueness of Yogyakarta, Javanese values, Modernity, Socio-cultural Shift, Interfaith interaction*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merekam dinamika pergeseran nilai luhur Kejawaan yang dihayati oleh penduduk Yogyakarta. Sebagai wilayah istimewa dalam struktur negara kesatuan Republik Indonesia, Yogyakarta senantiasa dipersepsikan sebagai wilayah multi-kultural dan kosmopolis yang istimewa, toleran, dan merayakan keberagaman. Citra ini tampak baik dalam retorika politis maupun dalam percakapan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan pendapat yang kuat di antara masyarakat Yogyakarta bahwa telah terjadi pergeseran sistem nilai yang masif di tengah perubahan sosial budaya. Hal ini mencerminkan ketegangan dan dinamika antara citra Yogyakarta di atas, dan keinginan melestarikan nilai-nilai luhur yang dipandang sebagai inti dari kepribadian Yogyakarta. Bersamaan dengan itu, ada keyakinan akan kelenturan budaya Yogyakarta dalam menanggung beban multi-kulturalisme, namun kuat pula kekuatiran akan tergerusnya nilai-nilai luhur oleh modernitas, meluasnya aransemen demografis (meningkatnya jumlah pendatang), dan kuatnya politik identitas, termasuk identitas agama. Memaknainya dalam perspektif yang lebih luas dalam bingkai dinamika gejala sosial nasional dan transnasional, dalam makalah ini peneliti berargumen bahwa Yogyakarta punya peluang untuk mengatasi ketegangan di atas melalui upaya terus menerus menjaga keseimbangan dari berbagai tegangan yang mendera tersebut, dan mengelola secara kreatif hubungan antar komponen masyarakat, termasuk dalam hubungan antar-iman. Lebih jauh lagi, melalui dinamika ini sebenarnya makna "Keistimewaan Yogyakarta" sedang dibangun, dan persepsi, nostalgia-nostalgia, nilai-nilai luhur Kejawaan sedang diramu ulang untuk menjadi sistem nilai baru. Karenanya proses sosial-budaya ini masih bersifat transisional yang hasil akhirnya masih terbuka.

Kata Kunci: *Keistimewaan Yogyakarta, Nilai-nilai Kejawaan, Modernitas, Pergeseran Sosial-Budaya, Hubungan Antar-iman.*

PENGANTAR

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang merekam dan menjelajahi dinamika pergeseran nilai yang terjadi di tengah masyarakat Yogyakarta. Fokus utamanya adalah di ranah pendidikan informal dalam keluarga dan masyarakat. "Nilai-nilai luhur" yang dimaksudkan adalah sistem nilai yang terbentuk dari praktek-praktek sosial yang menimba legitimasinya dari masa lalu, sebagai bagian dari pembentukan identitas. Oleh karena itu, nilai-nilai luhur ini adalah bagian dari apa yang disebut tradisi Jawa, khususnya yang berkembang di Yogyakarta.

Penelitian ini bermaksud menangkap gambaran ini pada aras masyarakat majemuk dan multi-kultural tanpa berpretensi menjelaskan seluruh dinamika yang ada. Rekaman ini mencuplik arus pandang di

maupun sinkronis untuk melekatkannya pada konteks perubahan sosial yang sedang terjadi.

Wawancara dilakukan terhadap empat puluh tujuh responden baik dilakukan secara individual maupun melalui tiga FGD. Usia responden adalah antara usia 19 dan 65 tahun. Dua FGD dilakukan terhadap aktivitas pengajian dan kelompok Dasa Wisma PKK di Kelurahan Warungboto, Kotamadya Yogyakarta, sementara satu FGD dilakukan di *angkringan* Wijilan, Alun-alun Selatan, Kotamadya Yogyakarta. Profesi dari responden menyebar dosen, guru, mahasiswa, pegawai negeri, rohaniwan, ibu rumah tangga, dan karyawan swasta. Sebagian dari mereka adalah aktivis kampus, aktivis keagamaan (Pengajian, Muda-mudi Katolik MUDIKA, Kompa (Komisi Pemuda) Gereja Kristen Jawa), dan aktivis kegiatan sosial. Mereka tersebar mulai dari Pakem, Sleman hingga Umbulharjo di Kotamadya Yogyakarta bagian Selatan.

Bingkai Teori

Sebuah keniscayaan bahwa sebuah sistem budaya di sebuah tempat akan berubah mengikuti tuntutan zaman. Tidak ada satu sistem yang diam statis dan membiarkan dirinya mengalir begitu saja, pastah berdiam di tempat menanti nasib. Sekalipun bagi orang luar sistem tersebut tampak stagnan dan tidak menampakkan pergeseran berarti, juga sekalipun dari perspektif penghayat, “orang dalam” budaya yang dijalani tak berubah dan ada inti yang dianggap kekal. Akan tetapi, tidak cukup untuk menyatakan bahwa sistem budaya itu berubah. Perubahan itu tetaplah berada dalam asumsi dan bingkai dinamika tertentu. Ada semacam koridor atau acuan-acuan tertentu yang menjadi titik banding, acuan pergeseran di dalam apa yang disebut oleh Victor W. Turner, *social process*, yaitu ketika simbol, tanda-tanda (*signs*) budaya itu berkembang, diperbincangkan, ditantang, diproses, dikentalkan melalui praktek-praktek budaya tertentu; atau berbenturan dengan nilai lain di luar dirinya sembari menjaga nilai-nilai yang dianggap ideal. Juga dengan memakai perspektif teori pembentukan tradisi Jawa agar dapat melihat bahwa perubahan sistem budaya yang dimaksud sebagiannya adalah produk masa kini yang direka ulang dan diimbui bobot kekunoan demi menegaskan kesinambungan dengan masa lalu dan demi otoritasnya atas kehidupan masa kini (Hobsbawm 1984, 1).

Dunia ini, termasuk sistem budaya yang senantiasa menjadi (*becoming*), bukan sekedar mengada (*being*) dan karenanya perbincangan mengenai struktur sosial, persepsi, penghayatan, dan sistem nilai selalu berada dalam relasi organis antarelemen (Turner 1974, 24). Mengikuti argumentasi ini, maka persepsi terhadap nilai-nilai tertentu yang menjadi perhatian tulisan ini tidak dapat berhenti dipandang sebagai “nostalgia” belaka, yaitu kerinduan akan nilai-nilai masa lalu yang telah hilang. Persepsi ini dapat dipandang sebagai tindakan simbolis dalam ruang publik, bahkan dapat dilihat sebagai “produksi/konsumsi” wacana yang bersifat epifenomenal maupun sebagai bentuk reaksi/tanggapan terhadap dinamika yang ada melalui aktivitas keseharian (Certeau 1984, xiii). Apa yang beredar di kalangan “umum” ini berpotensi menjadi elemen operasional pada suatu model relasi masyarakat baru, baik itu masih dalam bentuk imaji sosial maupun yang tercermin dalam tindakan-tindakan sosial dan kebijakan publik. Pada terma yang ditawarkan Charles Taylor, suatu imaji sosial (*social imaginary*) adalah “cara orang membayangkan keberadaan sosialnya, bagaimana mereka dapat menyelaraskan diri dengan sesamanya, bagaimana dinamika yang terjadi di antara mereka dan sesamanya, harapan-harapan yang mereka hadapi, dan buah-buah pikiran maupun citra-citra yang melandasi harapan mereka tersebut” (Taylor 2004, 23). Gagasan ini menyarankan tumpang tindihnya antara dimensi simbolis, dimensi relasi, dan dimensi tindakan manusia di ruang sosial. Oleh karena itu, imaji sosial tidak dapat dipandang sebagai aktivitas yang terputus dari situs sosialnya. Taylor lebih lanjut menunjukkan bahwa orang-orang biasa membangun imaji terhadap lingkungan sekitar melalui kisah-kisah hidup, visualisasi, bahkan melalui legenda-legenda. Bukan itu saja, imaji sosial ini juga terbentuk melalui proses panjang dan terus menerus yang menciptakan kelaziman yang hadir dalam konteks komunal dan tercermin dalam praktek-praktek sosial. Pada akhirnya kelaziman ini menjadi semacam pembenaran atau legitimasi atas bentuk-bentuk imaji sosial tertentu (Taylor 2004, 23).

Melengkapi bingkai teori di atas, perlu menambahkan aspek diakronik, yaitu proses historis, genealogi, maupun kesinambungan, dan keterputusan dari warisan sebelumnya. Dari perspektif ini menemukan bahwa proses pembayangan (*imagining*) suatu tradisi juga dapat

dipandang sebagai proses pemenuhan hasrat dari alam ketidaksadaran yang membentuk mentalitas kolektif. Aspek ini, yang disebut dengan *sejarah mentalitas* (Kuntowijoyo 2003, 235–247), menyarankan bahwa dalam kaitan dengan pembentukan tradisi atau nilai-nilai terjadi kesinambungan dengan masa lalu, sekaligus keterputusan ketika proses ini sedang menanggapi tekanan masa kini (lih. juga Hobsbawm 1984, 1–14). Lebih jauh lagi memahami sejarah mentalitas ini juga menolong untuk mengerti mentalitas kolektif (Kuntowijoyo 2003, 235–236), yaitu semacam ketidaksadaran bersama yang menuntun pada tindakan-tindakan sejarah tertentu, maupun produksi nilai yang menyebar dan hidup dengan legitimasi tertentu dalam masyarakat. Tahapan penelitian ini ada wawancara terhadap individual dan kelompok, studi literatur, analisa wacana terhadap pendapat tokoh dan penulis di media *online*, dua buah lagu yang bertema Yogyakarta, menjadi cara mendeteksi mentalitas kolektif tersebut, sebagai gejala permukaan yang mungkin tampak tidak relevan atau sudah semestinya. Akan tetapi, menganalisisnya lebih jauh dapat menyingkap dan mengendus dinamika yang penting sekaligus menarik. Observasi dan wawancara yang dilakukan adalah “jejak” (*clue*) dari gejala lebih luas yang sedang bergerak (Ginzburg 1992, 101–102). Lebih jauh lagi, dengan merekam persepsi orang Yogyakarta terhadap daerahnya paling sedikit adalah cara mendeteksi percik-percik energi sosial yang ada yang berpeluang menjadi basis transformasi sosial.

Cara pandang seperti ini, maka berusaha menghindarkan diri dari penilaian yang menyederhanakan suatu keadaan, dan sebaliknya menjadikannya sebagai jalan masuk untuk penggalian lebih jauh demi mengenali operasi-operasi budaya yang sedang bekerja. Melaluinya diharapkan gambaran tentang pendidikan nilai-nilai Jawa yang ingin dipromosikan menemui garis sambungannya dengan aspirasi yang beredar.

Yogyakarta Istimewa
Pulang ke kotamu
Ada setangkup baru dalam rindu
Masih seperti dulu
Tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna
Terhanyut aku akan nostalgia

...

*Namun kotamu badirkean senyummu abadi
Ijinkanlah aku untuk slalu pulang lagi*

(“Yogyakarta,” KLa Project, 1990)

*Jogja Jogja setiap istimewa
Istimewa negerinya istimewa orangnya
Jogja Jogja setiap istimewa
Jogja istimewa untuk Indonesia*

...
*Sepi ing pamrih rame ing nggawe
Sejarah ning kene wis mbuktikake
Jogja istimewa bukan hanya tuk dirinya
Jogja istimewa untuk Indonesia*

(“Jogja Istimewa,” Jogja Hip Hop Foundation, 2011)

Ada dua peristiwa besar yang menjadi gambaran pilihan, paling sedikit pilihan dari para elit pemangku kekuasaan di Yogyakarta, yang mencerminkan keunikan Yogyakarta, yaitu pada saat Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada 9 September 1945 memilih agar Kesultanan Yogyakarta menjadi bagian dari entitas negara-bangsa baru yang disebut Republik Indonesia. Ketika kekuasaan kolonial (Belanda) dan pendudukan (Jepang) surut, dan memberi peluang bagi Yogyakarta untuk meraih kembali mandat langit sebagai penerus sah kejayaan Mataram Islam di tanah Jawa, sang penerima mandat ini justru dengan rendah hati dan dengan sadar menyerahkan wilayah kekuasaannya ke dalam Republik Indonesia. Pada masa itu lebih dari 90 persen penduduk Kesultanan Yogyakarta buta huruf (Soemardjan 2009, 70), tetapi mereka taat penuh pada apapun yang menjadi keputusan junjungan mereka. Bagi mereka itu adalah yang pilihan terbaik, sekalipun tak jelas apa itu “Republik Indonesia,” serta konsekuensi politis dan sosial dari pilihan untuk bergabung dengannya. Akan tetapi, pekik “Merdeka” cukuplah untuk menjelaskan transisi hidup mereka yang tadinya di bawah kuasa Belanda kepada fase baru yang memberi harapan. Keputusan Sri Sultan ini lalu diformalkan dalam UU No. 3 tahun 1952, yang menjadi dasar hukum wilayah Kesultanan Yogyakarta untuk menjadi daerah istimewa yang setara kedudukannya dengan propinsi dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Pilihan yang kedua terjadi sehari sebelum Presiden Suharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998. Dengan turunnya beliau, maka secara formal berakhirilah era Orde Baru dan dimulainya era Reformasi. Pada waktu itu Sri Sultan Hamengku Buwono X di depan ratusan ribu demonstran memilih untuk bergabung dengan gerakan reformasi. Gerakan ini berhasil melengserkan Suharto yang sudah berkuasa tiga puluh tahun lamanya. Yang sangat menarik dari situasi ini adalah sementara di daerah-daerah lain seperti, Jakarta, Surakarta, Pekalongan, Surabaya, dan lain-lain terjadi kerusuhan besar, di Yogyakarta gerakan demonstrasi dengan tidak kurang satu juta orang yang turun ke jalan tidak berpucuk pada aksi kekerasan sama sekali (Mas'ood, Panggabean, and Azca, Muhammad Najib 2007, 201).

Kedua pilihan dan peristiwa di atas telah masuk dalam ingatan kolektif penduduk Yogyakarta, ataupun bagi mereka yang punya hubungan emosional dengannya. Peristiwa pertama, telah menjadi semacam *myth of origin* dari posisi Yogyakarta di antara propinsi-propinsi lainnya, yaitu sebagai legitimasi politik sekaligus kultural dari "Keistimewaan Yogyakarta." Terlebih lagi pilihan ini hanya salah satu dari pilihan-pilihan lain dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX, seperti reformasi birokrasi keraton, inisiatif pendirian Universitas Gadjah Mada, dan keputusannya untuk menjadikan kota Yogyakarta sebagai "ibukota darurat" Indonesia (Mas'ood, Panggabean, and Azca, Muhammad Najib 2007, 207, dan seterusnya). Semua itu bukan saja Yogyakarta menjadi istimewa, tetapi juga menjadikan Sri Sultan sebagai sosok legendaris dan demokratis baik di tingkat lokal maupun nasional. Melalui konstruksi budaya dan politik ini, sekalipun Yogyakarta hanyalah bagian dari negara Indonesia, sosok Sultan dari perspektif masyarakat Yogyakarta (setidaknya oleh mereka yang menghidupi budaya Jawa) justru melampaui batas-batas tersebut. Ia tidak saja besar karena pilihan politisnya, tetapi juga oleh wacana kekuasaan Jawa yang melekat padanya. Ia adalah *gung binathara, bau dbendha nyakrawati* ("sebesar kekuasaan dewa, pemelihara hukum, dan penguasa dunia") (Moedjanto 1987, 77-78). Sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan wacana Raja Jawa dalam sejarah maupun di tempat lain; di Surakarta misalnya. Akan tetapi, berbeda dari wacana ini adalah pilihan politis

yang berani tersebut di atas, yang alih-alih menurunkan pamor, justru memperkuat pamor Sri Sultan. Pada titik ini ada semacam pembentukan sejarah mentalitas – tentunya bersama proses-proses historis lainnya yang juga berpengaruh – yang membentuk arah orientasi Yogyakarta dan membentuk mentalitas kolektif. Imaji akan “keistimewaan” Yogyakarta lalu menjadi anjar yang terus menerus dimaknai dan dihidupi.

Sedangkan pada peristiwa yang kedua terjadi dinamika lain yang penting. Yaitu kombinasi sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X dan kultur Yogyakarta yang rupanya sudah terbentuk sebelumnya. Keputusan Sri Sultan saat itu untuk bergabung dengan gerakan reformasi sebagian tampaknya karena dikondisikan oleh situasi politik dan “tuntutan” massa. Bukan berarti Sri Sultan tidak memberi pengaruh. Ia diketahui berkeliling kota Yogyakarta selama masa-masa kritis tersebut untuk memberikan semacam *spiritual assurance* kepada masyarakat. Rupanya ada topangan lain yang mendukung situasi ini, yaitu anggapan bahwa faktor kultural yang khas yang dihidupi masyarakat Yogyakarta. Peristiwa itu seakan hanya memberikan semacam peneguhan jika tidak disebut ujian kepada citra Yogyakarta sebagai kota yang ramah, toleran, dan istimewa. Syair lagu-lagu tadi merangkum semua itu.

Citra Yogyakarta, baik pada aras kotamadya maupun propinsi sebagai kota pelajar, kota yang ramah, ibukota peradaban Jawa, *city of tolerance*, dan kota wisata sangat kuat terpatrit baik oleh penduduk Yogyakarta, bagi mereka yang pernah ke Yogyakarta dan menetap, bagi pendatang, maupun bagi wisatawan. Yogyakarta adalah miniatur Indonesia dan “Rumah Bersama” *multi-etnik sebagaimana disampaikan* oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam sebuah pidato kebudayaannya (Sri Sultan Hamengkubuwono X, 2013). Gambaran ideal Yogyakarta ini bagi sebagian orang, termasuk oleh semua responden yang diwawancarai telah direifikasi sebagai keniscayaan. Keistimewaan Yogyakarta yang diungkapkan dalam bahasa harmoni hubungan antarwarganya dan sikap toleransi yang diwakilkan melalui pidato kebudayaan ini tidak saja sekedar menjadi pengalaman yang sudah berlalu, melainkan juga harapan dan buritan untuk mengendalikan Yogyakarta sebagai biduk yang sedang menerjang arus perubahan zaman.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga menggali falsafah Jawa untuk membangun lingkungan hidup yang lebih baik melalui falsafah

"*Hamemayu Hayuning Bawana*" yang diartikan sebagai "mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup di dunia" atau dalam pengertian yang lain, "mengembangkan kebudayaan baik yang kita miliki dan meminimalisir atau menghilangkan perilaku atau kebiasaan buruk yang ada dan berupaya menumbuhkan budaya baik sesuai dengan tuntutan zaman." Sementara itu sandingannya adalah *Hamemayu hayuning manungsa*, yaitu "himbauan untuk menjadi *sejatining manungso* (manusia yang sepenuh-penuhnya) dengan memanusiakan manusia" (Maryono 2013). Merangkum itu semua, Sri Sultan menyebutkan bahwa Yogyakarta adalah lokasi budaya dan ruang interaksi untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut, yang disuling melalui wacana *omah*: Yogyakarta sebagai *omah*. *Omah* sebagai ruang menetap dan tempat untuk membentuk *bale soma* (keluarga) di atas *Pomahan* (kumpulan rumah-rumah) (Sri Sultan Hamengkubuwono X 2013). Melaluiinya citra Yogyakarta sebagai ruang "keluarga" dan "berkeluarga" dilestarikan, baik secara simbolik maupun dalam praktek keseharian. Tidak sulit menemukan suatu keluarga yang berasal dari daerah yang berbeda Indonesia, tetapi dipersatukan di Yogyakarta. Tidak sulit juga menemukan kaum pendatang yang menganggap Yogyakarta sebagai "kota kelahiran kedua." Sementara *pomahan* menunjukkan multikulturalisme yang sudah menjadi ciri wilayah ini di mana masing-masing unit budaya dari berbagai wilayah Indonesia, bahkan mancanegara menemukan tempat berteduh di Yogyakarta.

Dari pemaknaan nilai-nilai tadi, maka tradisi-tradisi lalu diciptakan terus menerus untuk menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi (lih. Hobsbawm 1984). Pemerintah Kotamadya yang mendeklarasikan falsafah Yogyakarta sebagai *Segoro Amarto*. *Segoro Amarto* adalah sebuah akronim dari "Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta" (Suryanto 2013; Pemkot Yogyakarta 2002) yang terdiri dari empat pilar: kemandirian, kedisiplinan, kepedulian, dan kebersamaan. Dengan empat pilar ini, maka filosofi *Segoro Amarto* menjadi "modal sosial mewujudkan Jogja Istimewa" (Suryanto 2013). Dari dinamika ini, yaitu idealisasi-idealisisasi, peneguhan nilai-nilai, pelestarian maupun penciptaan jargon-jargon budaya baru sebenarnya menyiratkan sesuatu, yaitu sebagai tanggapan terhadap pergeseran nilai-nilai yang demikian masif terjadi dengan mencoba memegang kendali zaman melalui penemuan kembali nilai-nilai adiluhung Jawa,

sekaligus perluasan makna Keyogyaan yang ingin disesuaikan dengan perkembangan masyarakat masa kini. Kecenderungan yang pertama mungkin dapat disepadankan dengan munculnya falsafah *Tribita Karana* di Propinsi Bali, yang menurut seorang tokoh Bali muncul setelah 1965, sebagai upaya menggali nilai-nilai Hindu Bali dalam menemukan titik keseimbangan spiritual dan budaya yang baru setelah peristiwa berdarah 1965.² Maka penting untuk melihat preseden sejarah dan persepsi masa kini dalam melihat dinamika tersebut.

Yogyakarta telah menjadi tempat persemaian praktek-praktek sosial yang menarik sejak dahulu. Menurut Sri Sultan di tahun 1950-an pernah terjadi konflik sosial antara penduduk setempat dan mahasiswa dari luar Yogyakarta. Konflik ini berhasil diselesaikan melalui didirikannya Asrama Aceh dan Asrama Papua dengan dukungan material penuh dari Sri Sultan Hamengkubowono IX. Dengan mulai terjalin hubungan sosial yang alamiah antara ketiga kelompok sosial ini, maka momen ini menjadi preseden bagi relasi sosial antara masyarakat Yogyakarta dan kaum pendatang selanjutnya (Sri Sultan Hamengkubowono X, 2013). Ada ruang luas perjumpaan antara modernitas dan tradisionalisme di Yogyakarta, antara gagasan Barat mengenai kemajuan dan keterbukaan pikiran, demikian juga keterbukaan dan penyerapan pemikiran baru, misalnya di kalangan masyarakat Kauman yang Islami. Tidak heran Yogyakarta menghasilkan pemikir-pemikir elit dari kalangan Islam, Katolik dan Protestan (Surjomihardjo 2008, 203–209). Yogyakarta juga memiliki sejarah kesadaran politik yang unik, yang salah satunya didukung oleh populasi mahasiswanya yang luar biasa yang mempunyai energi meluber bagi gagasan-gagasan yang unik, nakal, bahkan seringkali radikal. “Peristiwa Yogya 1992” menjelang Pemilu 1992 hanyalah salah satu contoh bagaimana kesadaran politis ini demikian menonjol ketika politik masa itu, di Era Orde Baru tak lebih dari panggung sandiwara yang disebut “Pesta Demokrasi” (Budi Susanto, 1993). Yogyakarta juga menjadi lahan persemaian dari pemikiran-pemikiran yang berseberangan dengan penguasa melalui kelompok-kelompok studi mahasiswa dan misalnya melalui penyebaran novel-novel Pramoedya Ananta Toer.

2 Disampaikan oleh Prof. Dr. Ida Bagus Gunadha, MSi dalam kuliah tentang Politik dalam Agama Hindu, Mei 2013 di Denpasar. *Tri Hita Karana* = tiga penyebab kebahagiaan, yaitu keseimbangan dunia rohani (*parhyangan*), dunia manusia (*pawongan*), dan alam (*pelemahan*).

Akan tetapi, pengalaman-pengalaman di atas juga telah menghasilkan “romantisme” yang menjadi legitimasi bagi keberlangsungan Yogya yang serba manis, serba menarik, dan subtil (lih. Jatmika 2009; Priyatmono 2009). Banyak hal Yogyakarta menjadi pelopor praktek-praktek budaya tertentu seperti *plesetan* (*slapstick joke*) yang sempat membahana di era 1980-1990an (Jatmika 2009, 62). Di suatu masa, di era 1970-1990an semangat Yogyakarta sebagai *city of tolerance* (dengan “C” kecil) dikenang sebagai babak terbaik di mana multikulturalisme berkembang secara alamiah: “identitas suku, agama dan golongan tidak hilang ... namun tetap satu dengan siraman ke-Yogyakarta-an” (Priyatmono 2009, 95). Era itu dikenang sebagai era pengakuan akan adanya perbedaan tanpa klaim kebenaran. Juga di bidang seni-budaya, di mana Yogyakarta menjadi salah satu kiblat rupa-rupa seni di Indonesia, baik yang tradisional, posmo, hingga yang sepenuhnya globalis, ia bukan saja menjadi ruang berekspresi tapi juga ruang eksperimen tiada henti yang telah melalui krisis identitas berkali-kali (band. Sunardi 2012, 349–354).

Jika kita merefleksikan penggalan dua syair lagu di atas yang mewakili dua generasi yang berbeda dan *episteme* yang juga berbeda. Jarak epistemologi yang diciptakan antara syair lagu KLa Project “Yogyakarta” yang mewakili era 1990 (Katon Bagaskara 2007), dengan syair Jogja Hip Hop “Jogja Istimewa” yang mewakili dekade pertama milenium mencerminkan ketegangan dua *episteme* tersebut. Suasana era Orde Baru dengan kendali penguasa yang nyaris purna, Yogyakarta dicitrakan sebagai sebuah kota yang abadi dengan “senyumnya” yang abadi seperti syair lagu KLa Project ini. Tak satu kata “Yogya” atau “Yogyakarta” yang muncul dalam syairnya, kecuali tentu saja judulnya. Tersirat bahwa lagu Yogyakarta ini meneguhkan citra yang sudah larut di benak pendengarnya sehingga tak perlu lagi menyebut-nyebut dengan gamblang namanya dalam syair. “Yogyakarta” tidak dibuat sebagai penanda yang menantang keyakinan para pendengarnya, sebaliknya menjadi muara ingatan-ingatan indah yang berkaitan dengan kota itu.

Sebaliknya Jogja Hip Hop Foundation (JHF) yang berdiri tahun 2003 dalam syair lagunya, “Jogja Istimewa” menekankan berulang-ulang keistimewaan Yogyakarta, ada semacam nada polemik dalam syair-syair yang disampaikan secara *hybrid* dalam bahasa Jawa dan irama hip

hop. Tampak jelas konteks sosial politik, *episteme* yang melahirkan lagu ini adalah krisis tentang Keistimewaan Yogyakarta yang dipersoalkan oleh sementara kalangan. Maka dari itu, pada titik ini Keistimewaan Yogyakarta bukan lagi keniscayaan, paling sedikit secara politis. Ia harus diperjuangkan, diteguhkan, dan diidealisasikan terus menerus. Salah satu yang menarik adalah penggalan syair terakhir, “Jogja istimewa untuk Indonesia.” Syair ini seakan menunjukkan harga yang harus dibayar sebagai sesuatu yang istimewa, yaitu ia harus melayani kepentingan orang lain.

Sinyalemen ini juga muncul dalam diskusi bersama dua orang responden penelitian (Bp. YS dan Bp. BA) yang mengatakan Yogyakarta itu “untuk orang lain,” tidak selalu demi Yogyakarta itu sendiri. Ada sedikit kegetiran dalam nada bicara mereka bahwa dalam situasi serba ramai ini, hingar bingar dengan kondisi kemajemukan masyarakat Yogyakarta, ada yang terlewatkan. Secara tersirat dalam diskusi dengan responden, (sebagian) orang Yogyakarta, bahwa mereka harus mengorbankan sebagian tradisi mereka demi kemajemukan Yogyakarta. Bagi sebagian mereka ini menjadi ciri masyarakat Yogyakarta yang “terbuka” terhadap orang luar.

Jika sudah menyangkut kemajemukan Yogyakarta dalam naungan peradaban Jawa, harus mengayomi berbagai ekspresi budaya lainnya yang di dalamnya meliputi keberagaman etnik, agama, budaya, dan sebagainya, lalu persoalannya adalah siapa itu orang Yogya(karta)?

Siapa Orang Yogya? Negosiasi antara Identitas Kultural dan Politik

Pertanyaan tentang identitas siapakah yang dapat disebut orang Yogya dikemukakan kepada responden, muncul tanggapan spontan: yang lahir di Yogya; yang tinggal di Yogya. Spontanitas jawaban ini menunjukkan bahwa masyarakat Yogya memiliki cara mengidentifikasi diri dan lokasi, yang menunjukkan keterkaitan yang erat antara orang dan tanah tempat di mana mereka lahir dan tinggal. Kesadaran kolektif tentang tanah tempat kelahiran dan tanah tempat mereka tinggal muncul secara spontan dan dominan. Sebaliknya ada pula yang menjawab lebih dalam tataran lebih simbolis sebagaimana yang disampaikan oleh LR, seorang mahasiswi:

mengenai semangat mencintai dan menghargai Yogya sebagai bagian yang sudah mendarah daging dalam kehidupannya. Jika hanya sebatas berdomisili di Yogya tentu tidak bisa disebut dengan orang Yogya, karena banyak juga pendatang yang tinggal dan menetap di Yogya.

Oleh karena itu, sebagai wacana, kemajemukan mengandaikan batas nyata dan imajiner dari suatu identitas, bahkan seringkali dalam bentuk reifikasi dan tidak selamanya lentur. Oleh karena itu, ia justru menjadi ruang ketegangan tersendiri di mana hibriditas dan cairnya relasi menjadi terbatas. Seperti diindikasikan dalam penelitian ini, penduduk pendatang lalu dipaksa untuk “menjadi Jawa” (*njawani*). Banyaknya aktivitas kebudayaan tidak selalu merayakan keberagaman sebab sebagaimana sinyalemen (menurut responden WCh), aktivitas itu umumnya masih berkisar pada kebudayaan Jawa. Menarik sekali sebab sebaliknya dari situasi ini, pidato Sri Sultan Hamengkubuwono X, selaku gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta justru menyarankan orang luar Yogyakarta jangan menjadi orang Yogya: “biarlah orang Rote [penduduk salah satu pulau di propinsi Nusa Tenggara Timur] tetaplah menjadi orang Rote” (Sri Sultan Hamengkubuwono X 2013). Hal ini juga diaminikan oleh WCh sebagai berikut:

Ketika kita memperkenalkan kebudayaan, tidak bermaksud kaum muda beradaptasi dan menjadi seperti orang Jogja. Tapi, bagaimana caranya mereka bisa membawa diri secara baik dan pantas dalam lingkungan pergaulan. Tapi, terus bukan berarti orang Jogja juga merasa eksklusif, melainkan bagaimana kita bisa hidup dengan nyaman bersama dengan orang lain, tanpa melihat latar belakang seseorang, yang penting baik dan pantas.

Bagi yang mengaitkan Yogya dengan domisili, jawaban lebih hipotetikal muncul ketika responden mendapat pertanyaan lebih jauh, apakah anak-anak dari orang Yogya (dalam kriteria di atas) yang lahir di luar Yogyakarta (misalnya lahir di Jakarta, Semarang, dan lain-lain) mereka dapat disebut atau dapat mengklaim dirinya sebagai orang Yogyakarta. Sebagian besar responden menyatakan boleh saja anak-anak keturunan dari Yogyakarta ‘asli’ yang lahir dan tinggal di tempat lain di luar Yogya menyebut diri sebagai orang Yogyakarta. Ibu SH misalnya menyatakan:

Ya *anake wong* Yogya boleh saja *to* menyebut dia orang Yogya, kalau dia merasakan itu, *wong* nyatanya ada darah Yogya-nya. Sepupu saya yang lahir dan besar di Jakarta sering kalau ditanya di kantornya dia menyebut dirinya *wong* Yogya.

Akan tetapi, persepsi responden tentang identitas siapa orang Yogya ini berubah menjadi lebih tegas seperti disinggung sebelumnya, yaitu bila identitas ini dikaitkan dengan akses pada sumber-sumber pembangunan yang bersifat material, seperti akses pada jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan semacamnya yang disediakan oleh pemerintah. Barangkali karena terbatasnya sumber material yang dapat didistribusikan kepada warga, secara serempak hampir semua responden dalam dua FGD menyatakan bahwa hanya mereka yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Yogyakarta yang berhak menerima bantuan-bantuan pembangunan dari negara tersebut yang dialokasikan melalui pemerintah provinsi DIY. Dengan kata lain, mereka yang tinggal dan lahir di Yogya –seperti dikemukakan sebelumnya, tetapi tidak memiliki KTP Yogyakarta maka mereka tidak boleh mengakses fasilitas bantuan langsung yang dialokasikan melalui Pemprov DIY tersebut. Ibu BSR misalnya, menyatakan argumennya sebagai berikut:

Gini lho bu, orang yang lahir di Yogya, tetapi kemudian dia pindah ke tempat lain boleh saja dia menyebut dirinya orang Yogya. Tetapi kalau untuk menerima Jamkesta (Jaminan Kesehatan Kota dari Pemerintah Kota Yogyakarta), misalnya, ya jangan lah, dia kan tidak punya KTP Yogya. Dia mestinya ya mengikuti aturan tempat dia tinggal itu kan; yang bantuan-bantuan oleh Pemkot Yogya ya hanya untuk yang ber-KTP Yogya saja. Kalau dia tinggal di Yogya, tapi tidak punya KTP Yogya, menurut saya ya tidak boleh juga. Nanti kalau dibolehkan orang-orang ini akan memanfaatkan bantuan dari Pemkot Yogya lalu mungkin juga memanfaatkan bantuan di tempat dia ber-KTP itu.

Argumen yang dikemukakan ibu BSR ini mendapat sambutan persetujuan dari sebagian besar peserta FGD yang lain. Ada seorang ibu, ST, yang mengajukan pendapat yang sedikit lain:

Saya setuju kalau kepemilikan KTP itu menjadi bukti dia orang Yogya, tetapi saya kok ya sering kasihan melihat [dia menyebut nama si SRKW, misalnya] yang sudah lama tinggal di kampung ini, hidupnya sangat pas-pasan tetapi tidak pernah dapat bantuan Pemkot karena KTP-nya bukan Yogya. Apa ya pemerintah itu sedemikian pilih-pilih to, kan dia juga rakyat Indonesia.

Dari beberapa pertanyaan tentang siapa orang Yogya ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran atau imaji kolektif warga Yogyakarta tentang identitas orang Yogyakarta dalam tidak bersifat statis, tetapi mewujud dalam konsep yang dinamis. Nampak adanya negosiasi antara tarikan primordialisme darah keturunan, kultur, dan politik. Masyarakat

Yogyakarta yang berpartisipasi dalam penelitian ini menunjukkan kelenturan atau keluwesan batasan imajiner tentang yang disebut orang Yogya secara keturunan dan kultural –siapa pun dan di mana pun dia tinggal asalkan dia lahir di Yogya, atau keturunan dari orang Yogya, mereka boleh menyebut diri sebagai orang Yogya. Akan tetapi keluwesan itu menjadi hilang, bila identitas ini dikaitkan dengan akses pada sumber ekonomi yang terbatas. Identitas resmi yang dibuat oleh institusi Negara, berupa KTP menjadi persyaratan utama untuk menjadi orang Yogya yang dapat mengakses sumber daya material pembangunan yang didistribusikan oleh Negara melalui Pemprov DIY.

Melihat diskusi demografis menarik untuk melihat dinamika aransemen ruang sosial. Sejak era kolonial dinamika pertumbuhan kota Yogyakarta dari kota kerajaan hingga menjadi kota yang didesain ala kolonial Belanda menyebabkannya menjadi ruang sosial yang menjaga keseimbangan antara administrasi kolonial dan kota tradisional Jawa, serta menjadi ruang perjumpaan yang intensif antara berbagai modus gaya hidup dan pemikiran. Akan tetapi, di sisi lain di luar tembok keraton, yang menjadi poros peradaban kota Yogyakarta, perkampungan berkembang semula berdasarkan hubungan dengan keraton dalam menyediakan barang dan jasa. Kampung-kampung ini berada dalam kaitan fungsi-fungsi tertentu dalam struktur pemerintahan keraton (Newberry 2013, 35). Maka ada *pacinan* (kampung Cina), kampung Gandekan (*gandbek*: bentara), *Siliran* (petugas *silir* yang menyalakan lampu keraton), Prawirotaman (pengurus taman), *Patehan* (pembuat teh), *Mantrigawen* (para pegawai), Pajeksan (jaksa), *Dagen* (*undagi*: tukang kayu), Jlagran (*jlogro*: tukang batu), Kauman (kaum santri), dan seterusnya (Newberry 2013, 33; Subkhan 2007, 56–57). Banyaknya kampung, dan ekpresi bahwa kota Yogyakarta pada dasarnya “kampung besar” bisa jadi menegaskan dimensi ke-*wong cilik*-an, atau bahkan “kerakyatan” yang lalu menjadi kesadaran kolektif.³ Namun perkembangan selanjutnya

3 Sumber kesadaran kolektif ini mungkin juga disumbangkan oleh almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono IX (bertahta 1940-1988) yang mendekatkan diri dengan rakyat Yogyakarta dengan meringkas hubungan protokoler istana melalui peniadaan lapisan *punggawa* (Newberry 2013, 36n6; Mas’oed, Panggabean, and Azca, Muhammad Najib 2007, 202). Lih. juga (Atmakusumah 2011) dan pidato penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono X, tanggal 7 Maret 1989: “Buat apa sebuah tahta dan menjadi Sultan, apabila tidak memberi manfaat bagi masyarakat ...” (Rosari 2011, 3).

terjadi apa yang disebut Sullivan, *vulgarization* (“pendangkalan”; Newberry menerjemahkannya “kemerosotan” (Newberry 2013, 35)). Kampung menjadi semata-mata tempat tinggal, dan khususnya tempat tinggal *wong cilik* (Newberry 2013, 35). Di sisi lain vulgarisasi ini justru memperluas jangkauan serapan kategori kependudukan melalui hadirnya para pendatang.

Sejalan dengan proses di atas, Yogyakarta menjadi salah satu dari pusat peradaban Jawa yang dipandang menghasilkan produk-produk budaya tinggi dibanding wilayah kultural Jawa lainnya. Berkat keterbukaan keraton yang dipelopori Sri Sultan Hamengku Buwono IX melalui inisiatif demokratisasi keraton, Yogyakarta juga mengalami proses komodifikasi, dan demokratisasi budaya Jawa. Contohnya adalah Yogyakarta lah yang mengawali pementasan tarian klasik di luar tembok keraton, yang dimulai dengan sendratari Ramayana di Prambanan di tahun 1960an. Sejak itu, hotel-hotel di Yogyakarta mulai menyelenggarakan pertunjukan penggalan sendratari Ramayan sendiri sebagai bagian dari atraksi turisme (Hughes-Freeland 2011, 222). Turisme lalu menjadi pintu masuk yang ikut memoles Yogyakarta menjadi lubuk multikulturalisme dan kosmopolitanisme, serta transnasionalisasi; dengan segala implikasi sosialnya (Mas’oed, Panggabean, and Azca, Muhammad Najib 2007, 202). Terjadi vulgarisasi kebudayaan, tidak dalam konotasi negatifnya sebab hal ini pun dapat dipandang sebagai hal yang positif.⁴

⁴ Ketika diminta untuk memberi saran perbaikan agar budaya Jawa di Yogyakarta tidak lenyap, seorang responden (mbak LR) secara spesifik menyebut agar Yogyakarta memiru Propinsi Bali yang mampu mempertahankan seni dan budaya lokalnya. Lalu hendaknya mempertahankan bahasa dan tradisi Jawa dan mengajarkannya sebagai mata pelajaran wajib di sekolah lebih dari sekedar 2 jam yang disisihkan seperti dalam kurikulum saat ini. Berikut ini adalah daftar pepatah Jawa hasil wawancara kepada para responden, ketika mereka ditanyakan nilai-nilai adiluhung apa yang ingin dipertahankan dan dilestarikan: *tepa selira* (tenggang rasa), *mikul dhuwur mendhem jero* (meninggikan atau menonjolkan kelebihan serta kebaikan keluarga dan menutupi kekurangan atau keburukan keluarga), *crab agawe bulrah, rukun agawe santoso* (semacam bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh), *jer basuki mama beya* (Sejahtera/bahagia perlu pengorbanan), *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karu, tut wuri handayani* (Di depan memberi teladan, di tengah mendukung suatu tujuan, di belakang memberi daya/kekuatan), *gasing punika angud pangsi-ap syukur wonten ngarsana Pun Sang peparing gesang... nglampai kaulin prasaja lan laku tindak, ingkang labur... kedah talung tinulang mikul dhuwur mendhem jero* (Hidup itu adalah wujud syukur pada Sang Pemberi hidup dengan cara yang bijak dan sederhana, tingkah laku hidup yang baik didasari saling menolong dalam kebersamaan yang mengangkat setinggi-tingginya dan memendam sedalam-dalamnya), *ngalah dhuwur wekasane* (orang yang mengalah itu mulia; plesetannya: *ngalah dhuwur rekasane* (mengalah itu [malah jadi] susah), *aji ning diri*

Menanggapi perubahan sosial yang masif tadi, sebagian responden sepakat bahwa modernitas yang mereka pahami tak lepas dari “budaya kota” dan “budaya modern.” Sementara imajinasi sosial mereka akan budaya Jawa sangat dekat dengan budaya “kampung” dan “keluarga” yang dipandang lebih *guyub* dan kohesif. Kondisi ini diperumit dengan masifnya kehadiran pendatang yang hadir dalam waktu tertentu untuk belajar maupun bekerja, atau yang menetap dan menjadi orang Yogya. Pengalaman berikut ini menggambarkan ketegangan antara modernitas dan tradisionalitas.

“nek takon alamat ning ora midun soko montore, yo tak blasukke sisan” [“jika bertanya alamat tapi pengendara motornya tidak turun dari motor, ya saya sesatkan saja sekalian”].

Cuplikan pernyataan Bu ENS berada dalam ingatannya tentang konteks pertemuan keseharian ketika seorang pendatang dengan sang responden yang sedang mengurus rumahnya di kampungnya di Suryowijayan. Ketika si pendatang yang tidak paham adat lokal dan terlebih dari itu, meletakkan posisi dirinya lebih tinggi dari responden, dengan posisi mengendarai kendaraan bermotor, maka taktik budaya dalam menghadapi posisi tak setara ini adalah dengan memberi arah yang salah. Situasi ini mencerminkan ketegangan bukan saja antara pendatang dan penduduk setempat, melainkan diimbui antara modernitas dan tradisionalitas melalui “sepeda motor”, yaitu sebagai teknologi mobilitas, dan mengurus rumah yang *stationary*. Pengalaman yang dikenang responden ini hampir seperti karikatur yang menggambarkan orang Jawa yang *stationary* (mis. dalam mitos *alon alon waton kelakon*) dan budaya modern yang serba cepat sekaligus tidak sensitif. Taktik budaya serupa juga diambil ketika kaum pendatang bermaksud membangun asrama kelompok etnik mereka, seorang pejabat pemerintahan propinsi mengeluarkan jurus “izinnya dipersulit saja” (Sri Sultan Hamengkubuwono X, 2013). Sebab rupanya kehadiran asrama-asrama, yang saat ini tidak saja mewakili atau dibiayai oleh pemerintah propinsi-propinsi, tetapi juga lebih atomis dengan kehadiran asrama-asrama berbasis kabupaten dari seluruh Indonesia.

gumantung ono ing labi (harga diri tergantung dari ucapannya), *sadunak batbuk sanyari bumi*, *ditaba pesahing dodo luntaking ludiro tumekan pati* (~ mempertahankan harga diri hingga nyawa dipertaruhkan), *lungrab, irawung, rukun, sithik idhing*.

Paradoks di atas adalah dinamika yang terjadi karena Yogyakarta dalam kesadaran kolektifnya memosisikan diri sebagai ruang terbuka. Siapa saja bisa keluar dan masuk, dan relatif diterima dengan baik. Namun demikian selalu ada sisi paradoksnya seperti sudah ditunjukkan sebelumnya. Biar bagaimanapun keterbukaan itu ada batasnya dan tak selamanya gambaran Yogyakarta manis. Ruang pergaulan yang luas juga menyebabkan friksi sosial yang intens dan praktek-praktek sosial yang rumit. Ada harga yang harus dibayar; ada paradoks di dalamnya (Mas'ood, Panggabean, and Azca, Muhammad Najib, 2007: 200). Berbagai peristiwa berskala nasional terjadi di Yogyakarta. Tahun 1980-an misalnya, Yogyakarta terkenal karena terjadinya dua peristiwa penting, yaitu pembunuhan para Gali (preman) melalui insiden-insiden yang diakronimkan sebagai Petrus, "pembunuhan misterius" yang rupanya mencerminkan dinamika intelejen tingkat tinggi (Adam 2009, 49; Schwarz 2000, 249). Selain itu muncul laporan penelitian oleh kelompok studi Dasagung tentang praktek "kumpul kebo" di kalangan mahasiswa Yogyakarta. Terakhir tentunya dengan peristiwa Cebongan dan "ancaman" yang dilontarkan kepada "preman" kaum pendatang. "Preman" dalam titik ini hampir seperti simbol intimidasi terhadap kelompok pendatang tertentu yang senantiasa dikonotasikan dengan kriminalitas.

Pada kasus masyarakat Tionghoa di Yogyakarta. Mereka terlibat aktif dan berada dalam perlindungan Sri Sultan, sekaligus menjaga jarak dengan kekuasaan. Di Yogyakarta sepanjang sejarahnya belum pernah terjadi kerusuhan anti-Cina seperti yang terjadi di banyak tempat lain seperti Surakarta, Jakarta, Pekalongan, dan lain-lain (Susanto 2008, 28-43). Di sisi lain, mereka mengalami diskriminasi, misalnya melalui Instruksi Gubernur No. 898/1975 yang menyatakan bahwa hak kepemilikan tanah di Yogyakarta hanya diperuntukkan bagi penduduk pribumi. Implikasinya adalah bagi penduduk keturunan Tionghoa tidak bisa memiliki tanah di Yogyakarta kecuali hak guna belaka (Susanto 2008, 42).

Harga dari Wacana Kemajemukan: Hubungan Antar-iman

Hubungan dekat sekaligus berjarak sebagaimana komunitas Tionghoa tadi juga terjadi dalam konteks relasi antar-iman. Dalam sebuah sarasehan yang dihadiri oleh hadirin yang hampir semuanya berasal dari warga Kristiani, baik dari tradisi Katolisisme, Protestantisme maupun Pentakostalisme, mereka sangat setuju dengan pidato kebudayaan Sri

Sultan yang menekankan wacana kemajemukan (multikulturalisme) sebagai modal sosial wilayah Yogyakarta. Konformitas yang ditunjukkan peserta sarasehan adalah khas tanggapan kelompok minoritas terhadap politik lokal “apapun” yang menjamin keberlangsungan hidupnya. Perjalanan sejarah politik lokal semacam ini tak mesti sesuai dengan harapan kelompok, tetapi ada pengalaman panjang yang meneguhkan keyakinan ini. Pada titik ini Yogyakarta menjadi unik dan “istimewa” yaitu memiliki preseden sejarah akan pengelolaan dan perayaan keberagaman, dibanding dengan banyak daerah lainnya di Indonesia.

Demografi Yogyakarta juga terus menerus bergeser dan amat dinamis. Ada heterogenitas masyarakat dari segi agama, misalnya di kampung Warungboto tempat diselenggarakan dua FGD. Dalam ingatan para responden, pada masa-masa sebelum tahun 1990an di kampung mereka ada beberapa keluarga yang non Muslim, meskipun mayoritas beragama Islam. Anak keturunan dari keluarga non-Muslim ini ada yang berubah menjadi Islam, ada yang tetap Katholik dan berpindah tempat. Para responden menyatakan bahwa selama ini tidak pernah ada problem dengan beragamnya agama yang dipeluk oleh masyarakat Warungboto. Perhelatan keluarga seperti perkawinan, syukuran kelahiran bayi, khitanan dan sebagainya menjadi peristiwa sosial, komunal, dan keluarga yang dihadiri oleh warga tanpa membedakan agama. Kegiatan-kegiatan sosial lain seperti arisan, kumpulan Dasawisma, PKK, Posyandu, Kerjabakti, dan lain-lain menjadi ajang interaksi damai di antara para warga yang berbeda agama. Hal yang agak spesifik adalah pada peristiwa kematian karena pengurusan orang mati dari A-Z di Yogyakarta masih organisasi atau dilaksanakan oleh masyarakat, maka ketika ada seorang non-Muslim yang meninggal dan dia tinggal di tengah warga yang Muslim ada beberapa cara yang ditempuh oleh masyarakat Warungboto. Jalan umum yang paling sering ditempuh adalah, keluarga dan tetangga yang Muslim langsung menghubungi atau mencari sanak keluarga atau anggota masyarakat yang seiman dengan yang meninggal agar jenazah mendapat penghormatan sesuai dengan keyakinannya. Ibu KRD menjelaskan:

Dulu waktu Ibunya bu BMB meninggal, dia kan bukan orang Islam. Kami kan tidak tahu cara yang pas untuk merawat jenazahnya. Jadi ya kita hubungi keluarganya dan mereka lalu memanggil anggota jemaatnya atau pemimpin

mereka. Kami-kami ya tetap melayat di rumah itu, kita bantu apa keperluannya, kita bantu penyediaan makan minum, tenda kursi. Tetapi pas doa-doanya, cara mendandani jenazahnya ya dilakukan oleh orang-orang yang tahu dan seiman supaya tidak keliru. Siapa pun yang wafat di sini, ya kita tetap melayat seperti umumnya saja, tidak membedakan agama. *Jadi orang yang lumrah saja.*

Pada saat ini masyarakat Warungboto pada umumnya menjalani tradisi Islamnya dengan mengikuti praktik-praktik Muhammadiyah, seperti nampak pada mengikutinya mereka pada penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, pelaksanaan *sholat tarawih* dan sebagainya yang ditetapkan oleh Muhammadiyah. Sekitar enam tahun terakhir ini praktik keislaman di Warungboto nampak lebih bervariasi, khususnya dengan masuknya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Walaupun secara ritual ibadah tidak banyak berubah dengan masuknya kelompok PKS ini, tetapi dalam aktivitas sosial kemasyarakatan, seperti pada pertemuan-pertemuan warga, terkadang ada ketegangan atau kontestasi isi dan cara berorganisasi. Tradisi Mu-Nu (Muhammadiyah-NU), yang tampak pada diadopsinya tradisi masyarakat NU seperti *tablilan*, *slametan* pada hari-hari tertentu setelah kematian juga teramati hidup di kampung Warungboto. Masyarakat menerima ini sebagai fakta yang ada dan tidak pernah mencoba memproblematisasinya. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang lain tentang dialog antar-iman di masyarakat akar rumput bahwa keragaman masyarakat ini *diterima sebagai takdir* dan cara menghadapinya dapat beragam: ada yang mencoba untuk mengakui dan menghormati perbedaan itu, ada yang mencoba mengesampingkan perbedaan itu, dan ada pula yang fokus saja pada yang akan dilakukan bersama (Syamsiyatun, 2012).

Yogyakarta semakin beragam terutama dari segi budaya, suku, dan ekspresi agama. Perbedaan ini dapat diterima terutama karena semakin kuat kehadiran kelompok pendatang. Akan tetapi, terjadi juga segmentasi dan melebarnya jurang komunikasi antara penduduk setempat dan pendatang. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, sebagian indikatornya adalah kehadiran asrama-asrama Propinsi dan Kabupaten hampir dari seluruh pelosok Indonesia, dan menguatnya politik identitas. Sebagian responden yang merasa bahwa budaya Yogyakarta lebih “kuat” dari budaya pendatang sehingga pengaruh budaya yang dibawa oleh pendatang lebih kecil. Seharusnya kaum

pendatang menyesuaikan dengan adat istiadat setempat, yaitu “di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung.”

Berdasarkan persepsi responden yang Kristiani, ada kecenderungan menguatnya politik identitas. Hal ini sejalan dengan beberapa sinyalmen maupun hasil penelitian (Sri Sultan Hamengkubuwono X 2013; band. dalam dunia pendidikan Listia, Arham, and Gogali 2007; Salim, Kailani, and Azekiyah 2011; Tim Peneliti UIN Sunan Kalijaga 2012; juga Subkhan 2007; Shidqi 2008; Wicoyo 2011; Wicoyo 2013). Kuatnya politik identitas agama ditanggapi dengan cukup beragam namun umumnya dari pihak warga Kristiani ada semacam kekhawatiran akan perkembangan politik identitas ini, sebagaimana dikuatirkan oleh beberapa responden (misal Pak APM dan Mbak AKSK). Sebaliknya juga terjadi pengerasan identitas dari kalangan Kristen sendiri terutama dalam menghadapi kelompok Muslim “Fundamentalis”, tetapi Yogyakarta masih toleran. “FPI tidak berani mengobok-obok Yogya” ungkap Pak EPM, dan “Sri Sultan secara resmi melindungi Ahmadiyah,” meskipun baginya Yogyakarta sebagai *City of Tolerance* “masih sebatas doa, sebatas harapan.”

Ketika wilayah Yogyakarta dan Klaten dilanda gempa pada 27 Mei 2006, yang menelan korban 5.600 jiwa, 37.000 luka-luka, 156.000 kerusakan properti, dan kerugian mencapai 3 milyar USD (Elnashai et al. 2007, 5–6), isu Kristenisasi juga merebak (Indiyanto 2013, 74). Isu Kristenisasi ini sebenarnya sudah gencar di Yogyakarta sejak era 1990an. Sikap terhadap kaum Kristen dan bahaya Kristenisasi menyebabkan munculnya inisiatif-inisiatif untuk menandingi upaya ini oleh sekelompok organisasi Islam (Kim 1996, 203–228). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Soemarjo, pada tahun 1950an kerukunan antara warga Muslim dan Kristen di pedesaan Yogyakarta sungguh nyata. Trend serupa juga terjadi di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur (Soemarjo dalam Kim 1998, 62). Akan tetapi, terjadi pergeseran yang penting ketika akhir tahun 1970an dan 1980an arus kebangkitan Islam menderas yang berpengaruh pada relasi Muslim-Kristen. Dimulai sekitar tahun 1993 dan 1994 silaturahmi antara warga Muslim dan Kristen dalam acara Lebaran dan Natal semakin berkurang (Kim 1998, 63). Perubahan ini semakin tegas pada Era pasca-Reformasi (mis. Ferzacca 2005).

Toleransi antaragama di kampung para responden memberi pesan tentang dinamikanya. Ada yang mengaku semua berjalan rukun dan harmonis. Masing-masing kelompok agama saling menghormati dan menghadiri perayaan agama para tetangganya. Sebaliknya ada yang merasakan ketegangan yang meningkat bahkan di tingkat keluarga, terutama dalam keluarga yang berlatar belakang berbeda agama (misalnya, Mbak AKSK yang ayahnya berlatarbelakang Islam). Gesekan nilai itu terjadi antara keluarga inti Kristen dengan keluarga luas yang Islam dan Kejawen. Ada yang mengalami dalam hubungan dengan yang pertama sikap tenggang rasa dan toleransi yang melemah, sementara dengan yang kedua terjadi gesekan nilai yang dipandang bertentangan dengan ajaran Kristiani.

Ada hal yang menarik menyangkut menguatnya politik identitas keagamaan bahwa ada seorang responden yang memberi pendapat berbeda. Ketika dikonfrontir dengan realitas adanya dua sekolah menengah atas negeri yang semakin “Islami”, ia (Bp. YS, seorang guru SMKN, beragama Katolik) justru menyatakan bahwa pada aras pertemanan antara guru-guru sekolah negeri tidak ada masalah sama sekali. *Ia juga menunjukkan bahwa setiap sekolah pasti mempunyai satu atau lebih keunggulan yang ditonjolkan. Baginya ke-Islami-an sekolah-sekolah tertentu adalah menjadi ciri keunggulan daripada suatu kecenderungan negatif, jadi tidak ada masalah baginya.*

Di samping wacana kompetisi seperti tadi, ada arah lain yang muncul berdasarkan wawancara dengan sejumlah responden Kristiani. Menarik bahwa pelestarian dan pengembangan budaya Jawa sebagai ciri Yogyakarta yang berulang-ulang disebutkan oleh responden, juga menjadi program penting di kalangan Gereja Kristen Jawa (GKJ) dan Gereja Katolik di Yogyakarta. Beberapa jemaat GKJ memiliki Komisi Pelestari Budaya Jawa yang bertujuan meneguhkan kembali nafas Kejawaan dalam ibadah gerejawi maupun dalam pengembangan teologi publiknya. Kedua komunitas ini sudah cukup lama memadukan budaya Jawa dan tradisi Kristen (Eropa) dalam kehidupan gerejawinya, tetapi saat ini inisiatif ini makin diperkuat dan diberdayakan demi menghadapi tantangan dan pengaruh budaya “luar”. Di sisi lain pergeseran budaya Jawa sangat masif terutama di kalangan kaum muda. Ada kesan kuat dari para responden bahwa jika kaum muda tidak didampingi maka

budaya Jawa akan semakin merosot (sebagaimana pandangan Pak Pr). Responden lain Pendeta AH dan Mbak As, aktivis gereja, juga mengakui pentingnya mengembalikan tradisi Jawa karena dapat membantu terbentuknya karakter kaum muda. Keduanya mengakui bahwa saat ini telah terjadi pergeseran nilai dalam diri kaum muda, di mana kaum muda terjebak dalam nilai-nilai kebudayaan asing, dan mulai tidak peduli terhadap nilai-nilai luhur kebudayaan sendiri (baca: kebudayaan Jawa). Maka gereja dipakai menjadi sarana untuk mengembangkan nilai-nilai luhur seperti kesederhanaan dan kasih terhadap sesama melalui berbagai programnya seperti KTB (Kelompok Tumbuh Bersama), MUDIKA (Muda Mudi Katolik), Pendampingan Iman Remaja (PIR), dan lain-lain.

Inisiatif pelestarian budaya Jawa ini tidak lepas dari latar belakang pendidikan para pendeta GKJ maupun rohaniwan Katolik. Umumnya mereka menyelesaikan studi S1 Teologi di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Sekolah Tinggi Agama Kristen Marturia maupun *Seminari Tinggi Kentungan*. Ketiga lembaga pendidikan tinggi teologi Kristen dan Katolik, bersama beberapa lembaga Kristen dan Katolik lainnya ini sejak lama mengembangkan apa yang disebut dengan Teologia Kontekstual dari Inkulturasi. Bahkan logo GKJ adalah gunung yang dalam falsafah Jawa menggambarkan alam semesta ciptaan Tuhan. Teologi Kontekstual menekankan pada melahirkan teologi publik bertumpu pada konteks yang ada, terutama tradisi lokal.

Ada upaya meneguhkan bahkan mengaktivasi ulang ungkapan budaya masa lalu dalam konteks kekinian. Dengan demikian alih-alih “melestarikan budaya Jawa” yang terjadi adalah penciptaan (*invention*) budaya Jawa yang baru yang diasup oleh modernitas (misalnya, melalui berbagai dukungan teknologi digital dalam rekaman, dokumentasi, visualisasi, dan produksi suara) dan nilai maupun praktek budaya Jawa di masa lalu. Semua itu dikonstruksi dalam rangka menanggapi kenyataan sosial yang ada saat ini. Karenanya sekalipun hal ini bersifat retrospektif, untuk menghubungkan diri dengan masa lalu, dampaknya justru prospektif, yaitu untuk menanggapi masa kini dan menyongsong masa depan. Menurut filsuf sejarah, Eric Hobsbawm, sebuah tradisi yang diciptakan (*baru*) (*invented tradition*) adalah “sekumpulan praktek

yang biasanya diarahkan secara berlebihan atau tanpa sadar oleh aturan-aturan yang baku, atau oleh sebuah ritual maupun suatu gambaran simbolis. Melaluinya dan melalui pengulangan suatu nilai dan norma perilaku ditanamkan. Proses ini secara tak langsung menjamin keberlangsungannya dengan (tradisi tersebut di) masa lalu” (Hobsbawm 1984, 1–2). Maka upaya kontekstualisasi ini memberi makna baru pada Kekristenan sekaligus Kejawaan dan bukannya sepenuhnya membangkitkan budaya Jawa yang sudah tergerus. Budaya Jawa yang tradisional ini dikemas ulang dan dimaknai secara baru, seperti akan dipaparkan di bagian berikut. Akan tetapi, terlepas dari hal di atas ternyata menurut beberapa responden Kristiani lainnya sebagian besar gereja mereka tidak bersentuhan dengan budaya Jawa dan program-programnya tidak secara khusus membangun relasi antar-iman, meskipun ditataran kognitif mengakui pentingnya penghargaan terhadap sesama yang berbeda agama.

Relasi antar-agama di Yogyakarta mencerminkan suasana toleran sekaligus dinamis. Ada banyak hal yang bukanlah wacana lokal, misalnya menguatnya politik identitas. Situasi ini tentunya bukan khas Yogyakarta, sebab sudah menjadi isu yang hangat di tingkat nasional maupun internasional. Akan tetapi, cara anggota masyarakat Yogyakarta merespon terhadap semuanya itu memang menarik sebab ada upaya kuat untuk mempertahankan citra *City of Tolerance*, juga ada gejala yang lebih dinamis yang berkembang. Aspirasi untuk menjadikan Yogyakarta lebih Islami, atau sebagian warganya yang memperkuat identitas keagamaannya haruslah dilihat dalam posisinya yang lebih jelas. Misalnya aspirasi untuk pemurnian Islam dan penekanan-penekanan lainnya sudah ada sejak lama. Wilayah *jero beteng* yang memiliki wilayah Kauman yang Islami menunjukkan aspirasi ini bukan hal yang asing. Jadi, dinamika ini harus dilihat dalam kerangka transisional di mana tarik ulur wacana masih terus berlangsung. Di Yogyakarta mempunyai Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang kuat dan merupakan *pressure group* terhadap banyak kebijakan publik, tetapi di wilayah ini pula tumbuh inisiatif lokal seperti Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB), bersama sekian banyak organisasi-organisasi akar rumput berbasis antar-iman (Subkhan, 2007). Ini adalah salah satu paradoks dari *City of Tolerance*.

“Sekarang Banyak Mobil di sini”: Antara Modernitas dan Tradisionalitas

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, atau yang populer dipanggil “Jokowi” merefleksikan pengalamannya dulu ketika masih kuliah di Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta di era 1980-an. Sebuah acara reuni Fakultas Kehutanan UGM yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 26 Oktober 2013 yang baru berlalu, Jokowi menyatakan salah satu perubahan nyata antara masa ia kuliah dan sekarang ini adalah semakin banyak mahasiswa memiliki mobil dan membawanya ke kampus UGM. “Dulu kebanyakan mahasiswa jalan kaki, naik sepeda dan sebagian naik motor,” ujarnya. Sementara, “yang naik mobil hampir tidak ada.” Perbedaan dua kondisi ini, yaitu UGM di masanya dan saat ini, menunjukkan pergeseran penting dari citra UGM. Dulu UGM adalah “kampus rakyat” dengan cirinya yaitu tidak ada mahasiswa yang menggunakan mobil. Secara tersirat Jokowi ingin mengkritik bahwa saat ini UGM bukan lagi kampus rakyat (Idhom, 2013).

“Mobil” sebagai antitesis “kerakyatan” dalam pidato Jokowi di UGM mencerminkan pergeseran yang masif masyarakat Yogyakarta secara umum. Dalam catatan Dinas Pengelolaan Kas dan Aset Daerah (DPKAD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat jumlah kendaraan yang lalu lalang di jalan-jalan Yogyakarta di tahun 2012 berjumlah lebih dari satu juta; tepatnya 1.053.482 unit (Aditya 2012). Jumlah yang sangat besar mengingat wilayah hanya 3.185 km². Bandingkan dengan wilayah tetangga, propinsi Jawa Tengah yang luas wilayahnya sepuluh kali lipat propinsi DIY, namun jumlah kendaraannya hanya sembilan kali lebih banyak (BPS Jawa Tengah 2011). Dari jumlah tersebut pertumbuhan kendaraan roda empat sebesar 11.809 pertahun. Dampak dari kondisi ini sangat terasa terutama di kotamadya Yogyakarta dan sekitarnya. Hal ini telah dikeluhkan oleh responden dalam penelitian ini, dan suara-suara masyarakat lainnya yang dinyatakan di blog-blog maupun pemberitaan media massa. Tampak jelas dengan meningkatnya kemacetan di jalan-jalan protokol, hilangnya trotoar jalan karena menjadi lahan parkir dan pedagang kaki lima, dan kesemrawutan lainnya. Dengan kondisi geografisnya yang dibentengi oleh perbukitan Pathuk dalam rangkaian Pegunungan Selatan di sebelah Timur, Gunung Merapi di Utara, dan

rangkaian Perbukitan Menoreh di sebelah Barat menyebabkan wilayah kotamadya Yogyakarta cenderung memerangkap panas yang dihasilkan dari pantulan cahaya matahari maupun yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Kota Yogyakarta menjadi kota yang panas.

Ketegangan yang terjadi antara tradisionalisme dan modernitas juga terjadi melalui karya kreatif JHF yang menjadi ciri dari Yogyakarta. Dalam berkarya musik JHF berusaha mendataikannya melalui percampuran instrumen moderen dan gending Jawa. Sementara tujuan pendirian grup ini adalah untuk "... menghidupkan kembali sastra dan mantra tradisional" (<http://www.hiphopdiningrat.com/about/>). Ada ketegangan antara menjadi modern dan mempertahankan tradisi – tanpa selalu setuju untuk disebut "tradisional." Maka pergeseran nilai dalam hal ini bukanlah berarti pergerakan dari titik tradisional menuju titik modern, tetapi pergeseran antara menjadi modern tanpa kehilangan jati dirinya. Semua ini tak lepas dari konfigurasi sosial yang membentuk proses ini. Pada titik ini upaya menghidupkan kembali nilai-nilai ke-Jawa-an tidaklah semata *nostalgia* untuk menghidupkan kejayaan masa lalu. Dalam paradoksnya, sikap budaya ini justru juga menemukan ekspresi "ke-Jawa-an" baru yang *hybrid* dan transformatif. Proses ini tidak dapat disebut mulus-mulus saja. Demikian juga dengan ekspresi JHF yang disebut progresif, bukan karena keterputusannya dengan masa lalu, atau penyerapan budaya pop yang nyaris bulat yang diproduksi di negara-negara maju (terutama dari Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan). Justru progresivitas ini menemukan sangkut pautnya dengan budaya tradisional Jawa, melalui lirik, permainan kata, bahasa tubuh, *cultural gimmick*, lokasi penampilan, dan akhirnya melalui citra ideal Yogyakarta yang mereka bayangkan. Rupanya melalui proses yang dimisalkan pada dua contoh tersebut pada akhirnya bagi mereka yang berasal dari tradisi Jawa (baik sebagai penduduk asli maupun pendatang) memberi rasa kesinambungan pada tradisi Jawa tersebut. Sementara bagi yang tidak berasal dari tradisi Jawa, berpeluang menciptakan keterhubungan yang khas pada tradisi Jawa ini.

Di sisi lain, penyesuaian diri terhadap perkembangan teknologi demi kemaslahatan masyarakat, Yogyakarta adalah salah satu yang wacana teknologi, khususnya termasuk yang paling berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah keberhasilan penerapan *eGovernment*

One-Stop-Shop (OSS) sejak 2003 (Wahid, 2013: 4–10). Apalagi Yogyakarta memiliki sumber daya anak muda yang sangat besar. Mereka cukup dikenal sebagai anak muda yang kreatif dan enerjik, termasuk juga di dunia kejahatan *cyber*. Yogyakarta terkenal di kalangan peretas internet (*hacker* dan *cracker*) sebagai tempat dengan populasi tinggi para peretas internet di Indonesia (sebagaimana disinyalir oleh Onno W. Purbo, pakar IT (Lihat Lulusan SMA Bobol Pulsa Miliaran | Universitas Surabaya (UBAYA) 2013)).

Jika bagi sementara orang meyakini kelanggengan peradaban Yogyakarta bergantung pada penghormatan terhadap roh agung penjaga Gunung Merapi dan Ratu Laut Selatan yang cantik, maka kini keseimbangan itu terjadi antara modernitas dan tradisionalitas. Kelanggengan itu terjadi sebagai seni memelihara keseimbangan antara yang tradisional dan yang moderen. Ada tradisi “kesabaran, ketenangan, dan moderasi” (Mas’oed, Panggabean, and Azca, Muhammad Najib, 2007: 200) yang menjadi modal sosial untuk itu semua.

Vulgarisasi Yogya: “Jogjakarta” Kehilangan Jog-nya?

Yogya telah berubah. Demikian tanggapan semua responden yang diwawancarai. Sebagian besar menganggap Yogya berubah ke arah yang salah, semakin hedonistis (sinyalmen Mas ARS, Ibu EW, dan lainnya), semakin individualis, dan semakin kehilangan jati diri sebagai pusat peradaban Jawa, nilai-nilai luhur semakin terkikis. “Anak-anak sekarang tidak bisa lagi *basa* [berbahasa Jawa yang benar],” ujar Ibu ENS. Bahkan sebagian anak muda Yogyakarta lebih senang memakai bahasa Betawi atau larut dalam perkembangan sub-kultur baru seperti bahasa Alay, dan sebagainya. Jika tidak lekas dikelola pergeseran-pergeseran tersebut di atas dapat membuat Jogjakarta kehilangan “Jog-”nya dan tak ubahnya seperti “Jakarta” dengan segala problematikanya.

Saat ini dunia pendidikan Indonesia mendapat kritikan tajam karena dinilai mengalami keterpurukan, khususnya dalam mendidik kaum muda Indonesia. Keterpurukkan dunia pendidikan tentunya tidak hanya terjadi di satu tempat, tetapi hampir merata ke seluruh daerah yang ada Indonesia. Yogyakarta sebagai salah satu kota pendidikan di Indonesia juga mengalami hal serupa. Beberapa wawancara ada kesan bahwa kaum muda yang menjalani pendidikannya di Yogyakarta

perlahan mulai kehilangan pegangan terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Mereka digambarkan *easy going*, egois, kurang peduli terhadap sesama, individualis, bergaul terlalu bebas, lunturnya semangat kegotong royongan, kepekaan sosial, keguyuban masyarakatnya, persaudaraan, sopan santun (*subo siro, unggah ungguh*) (pengamatan Newberry, 2013: 16, 24), meningkatnya individualisme, penggunaan bahasa Betawi dalam percakapan sehari-hari, hilangnya tradisi *bancakan* yang diganti dengan perayaan di restoran, kontrol sosial yang melemah, dan lain-lain.

Di samping itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa saat ini pola pergaulan mulai terkotak-kotak, lebih memilih untuk tinggal dan bergaul dengan orang-orang yang berasal dari latar belakang yang sama (seperti satu daerah asal), dan kurang mau bersosialisasi dan beradaptasi dengan masyarakat setempat. Fenomena ini muncul karena sekolah dan kampus belum menyediakan media yang mumpuni untuk bisa mengakomodasi proses sosialisasi dan adaptasi kaum muda dengan lingkungan masyarakat. Beberapa persoalan ini tentunya kemudian menjadi ancaman bagi beberapa nilai yang telah hidup di tengah masyarakat Yogyakarta, yang menjadi pengikat dan pemersatu masyarakat. Nilai-nilai kebersamaan dan toleransi akan dengan mudah hilang jika fenomena individualisme, egoisme, sukuisme, dan tidak peduli sesama semakin berkembang di tengah masyarakat.

Berhadapan dengan situasi seperti ini, beberapa lembaga (baik pemerintah maupun agama) mulai memikirkan cara yang tepat untuk dapat segera mengatasi persoalan pergeseran nilai yang terjadi dalam diri kaum muda di Yogyakarta. Dari lembaga pemerintah misalnya Dinas Pariwisata mengadakan kegiatan Dimas dan Diajeng untuk dapat terus menjaga dan mempromosikan nilai-nilai luhur kebudayaan Yogyakarta bagi masyarakat Yogya pada umumnya, secara khusus bagi kaum muda. Kegiatan Dimas Diajeng ini dilaksanakan setiap tahun dan pesertanya adalah kaum muda. Ada satu hal yang menarik dalam kegiatan ini adalah peserta yang ikut di dalamnya bisa berasal dari daerah mana saja, tidak terikat cuma untuk mereka yang berasal dari Yogyakarta. Dari sistem ini sendiri menunjukkan bagaimana respek terhadap keberagaman itu masih ada, bahwa setiap orang bisa dan mampu menjaga dan mempromosikan nilai-nilai kebudayaan Yogyakarta.

Secara normatif beberapa responden melihat pentingnya sosok Sri Sultan sebagai soko guru peradaban Jawa dan pemelihara tradisi Jawa, serta yang menyebabkan Yogyakarta istimewa dibanding propinsi lainnya. Ketika terjadi gunung Merapi meletus dan gempa Mei 2006, Sri Sultan memerintahkan masyarakat (Jawa) Yogyakarta untuk memasak sayur *bobor* untuk menolak bala dan ditaati oleh sebagian masyarakat. Ekspresi ketundukan bisa digambarkan melalui ekspresi Jawa, yaitu *pejah gesang nderek Sri Sultan* (mati hidup turut Sri Sultan). Namun ada pula responden yang tidak melihat peranan nyata Sri Sultan dalam hal ini, terutama jika dibandingkan dengan Sri Sultan Hamengkubowono IX. Ada ketegangan terutama dengan semakin dekatnya kekuasaan dengan modal (*capital*) yang justru menjadi kekurangan dalam upaya menjunjung kembali nilai-nilai luhur. Kasus produksi dan replikasi mural "*Jogja Ora Didol*" (Jogja tidak dijual), mirip dengan "*Bali Not for Sale*" merupakan kesesakan rakyat terhadap penguasanya yang lebih condong kepada kuasa modal daripada kuasa moral. Inilah perlawanan akar rumput terhadap gejala kapitalisasi lingkungan di kota dan wilayah Yogyakarta. Gejala ini bukan saja soal pertarungan antara mempertahankan keaslian Yogyakarta melawan kuasa modal, tetapi juga perlawanan terhadap struktur pemerintahan yang sudah sangat bergeser dari fungsinya sebagai pengayom masyarakat. Tercermin di dalamnya tumpang tindih antara kuasa modal, kuasa budaya dan kuasa pemerintahan.

SIMPULAN

antara "Yogyakarta" dan "Jogjakarta"

Berbagai utas pengalaman yang dipaparkan sebelumnya inilah salah satu yang menyebabkan Yogyakarta dikondisikan menjadi "istimewa," berbeda dengan tempat-tempat lain di Jawa. Tentunya tanpa menafikan bahwa tempat lain pun punya keistimewaannya masing-masing. Akan tetapi, pengalaman Yogyakarta ini, semua itu perlu proses konstruksi, rekonstruksi, dan penciptaan secara kreatif yang massal, berkesinambungan, dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Di samping itu juga ada pilihan sejarah yang sangat menentukan sekalipun bukan satu-satunya. Demokratisasi yang dimulai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono, keterbukaan untuk menjadi tempat pengasingan berbagai tokoh nasional selama periode agresi militer

Belanda, pendirian Universitas Gadjah Mada yang memantik pendirian universitas-universitas lain, dan seterusnya, semua ini memberi landasan bagi kekhasan Yogyakarta menanggapi arus perubahan. Pada aras akar rumput seperti yang diindikasikan oleh penelitian, semua hal di atas ini yang menyebabkan tanggapan dari para responden tetap bernada optimistik dibalik ambiguitas. Ada keyakinan bahwa masyarakat Yogyakarta akan mampu melewati transisi sosial-budaya ini dengan selamat. Proses ini tidak pernah selesai. Masih banyak hal yang mesti dinanti luarannya, termasuk munculnya sikap kritis terhadap penguasa politik dan budaya, terhadap isu-isu keadilan.

Penelitian ini memperlihatkan tantangan hebat yang dihadapi masyarakat Yogyakarta dalam mempertahankan sistem nilai yang dipandang sebagai bagian dari Keistimewaan Yogyakarta. Paling baik adalah melihat seluruh proses ini sebagai transisi di mana yang terpenting elemen-elemen masyarakat sipil diberi ruang untuk ikut terlibat dalam pembentukan sistem nilai baru yang mengakomodasi dinamika modernitas dan mereka ulang sistem nilai tradisional dalam bingkai kekinian. Bukan semata keadaan yang niscaya sambil mereka apa yang “seharusnya.” Perbincangan soal nama yang benar dari Yogyakarta, yaitu apakah Yogyakarta, Jogjakarta, atau lainnya(?), mencerminkan dinamika ini.

Seorang arsitek memberi wawasan soal nama Yogyakarta dengan berujar demikian:

Seorang kanjeng dengan penuh takzim akan menyebutnya sebagai Praja Dalem Ngayogyakarta Hadiningrat; sedangkan kaos bergambar mata (yang lebih banyak palsunya) berjajar menjajakan kata Djokja; tulisan yang tertera di logo Never Ending Asia rancangan Walter Landor Assoc untuk memasarkan kota ini berbunyi Jogja (dari torehan Ngarsa Dalem, yang dulu saya baca Togja), bunyi yang paling sering digunakan untuk menyebut kata ini secara populer tapi dulu kalah dengan versi resmi birokrasi Yogyakarta; Cak Nun pernah berspekulasi sembari berseloroh dengan mengatakan bahwa kata Jogja berasal dari keramahan bakul wédang menawarkan tuangan tambahan, alias *jog*: “jog, ya?”; atau barangkali kota plésétan ini memang gemar berkelakar “joke, ya?” Banyak ragam cara menuliskan nama kota ini, kadang bahkan bertentangan satu sama lain. Seorang budayawan pernah mengungkapkan dengan gigih bahwa Yogya adalah salah kaprah, karena mestinya adalah A-Yogya yang awalan A menjadikannya memiliki kebalikan arti. Sebanyak cara menamai dan membaca nama kota ini sebanyak itu pula lah keragaman cara pandang dalam memahami sosok dan kehidupan kota ini (Santosa 2002).

Wawasan tadi bisa dibuat lebih semarak lagi melalui kegemaran berkelakar orang Yogya. Belakangan ini ada penamaan menarik di sebagian kalangan anak mudanya: "Anda dari mana? dari NY. New York? Bukan ... New Yogyakarta."

Sama seperti nama yang tertulis "Yogyakarta" yang dipakai dalam berbagai kesempatan, resmi maupun tidak resmi, sekalipun umumnya masyarakat mengucapkannya sebagai "Jogjakarta" atau variannya, maka demikianlah ketegangan antara yang tersirat dan yang terujar. Ini mencerminkan Yogyakarta yang memakai ketegangan dan selisih antara dua wacana itu sebagai seni memperbaiki diri. Dengan selalu berada dalam posisi "antara", antara ini dan itu, modernitas dan tradisionalitas, puritanisme dan kemoderatan, muncullah energi potensial untuk memperbaiki diri, walau mungkin dengan susah payah dan dengan emosi yang intens. Akan tetapi, justru hal ini tampaknya yang menyebabkan Yogyakarta punya persiapan dalam menghadapi perubahan. Meskipun tak dapat diramalkan dan semoga demikianlah adanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Asvi Warman. 2009. *Membongkar manipulasi sejarah: kontroversi pelaku dan peristiwa*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Aditya, Ivan. 2012. "Jumlah Kendaraan Di DIY Capai 1.053.482 Unit." *KRJogja.com*, Online edition, sec. Kota Yogyakarta. <http://krjogja.com/terkini.kr>.
- Atmakusumah, ed. 2011. *Takhta untuk rakyat: celah-celah kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- BPS Jawa Tengah. 2011. "Banyaknya Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Menurut Jenis Kendaraan." *Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah*. http://jateng.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=329:822&catid=54:transportasi-2011&Itemid=92.
- Budi Susanto, A. 1993. *Peristiwa Yogya, 1992: siasat politik massa rakyat kota*; Yogyakarta: Penerbit Kanisius; Lembaga Studi Realino.
- Certeau, Michel de. 1984. *The Practice of Everyday Life*. Berkeley: University of California Press.
- Elnashai, Amr S., Sung Jig Kim, Gun Jin Yun, and Djoni Sidarta. 2007. "The Yogyakarta Earthquake of May 27, 2006". MAE

Center Report No. 07-02. Urbana-Champaign, Ill.: Mid-America Earthquake Center.

Ginzburg, Carlo. 1992. *The Cheese and the Worms: The Cosmos of Sixteenth-Century Miller*. Edited by Anne Tedeschi. Translated by John Tedeschi. Baltimore: The John Hopkins University Press.

Hobsbawm, Eric. 1984. "Introduction: Inventing Traditions." In *The Invention of Tradition*, edited by Eric Hobsbawm and Terence Ranger, 1-14. Cambridge: Cambridge University Press.

Hughes-Freeland, Felicia. 2011. *Embodied Communities: Dance Traditions and Change in Java*. Berghahn Books.

Idhom, Addi Mawahibun. 2013. "Jokowi Sindir Banyak Mobil Di UGM." *Kompas.com*, Online edition, sec. Nusa. <http://www.tempo.co/read/news/2013/10/27/058524974/Jokowi-Sindir-Banyak-Mobil-di-UGM>.

Indiyanto, Agus. 2013. *Agama Di Indonesia Dalam Angka: Dinamika Demografis Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2000 Dan 2010*. Yogyakarta: CRCS.

Jatmika, Sidik. 2009. *Urip mung mampir nggayu: telaah sosiologis folklor Jogja*. Yogyakarta: Kanisius.

Katon Bagaskara. 2007. *KLa Project - Jogjakarta/ Yogyakarta (The Original Version)-1990*. http://www.youtube.com/watch?v=BBPs3Tkg0JA&feature=youtube_gdata_player.

Kim, Hyung-Jun. 1996. *Reformist Muslims in a Yogyakarta Village: The Islamic Transformation of Contemporary Socio-Religious Life*. Canberra: ANU Press.

Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana and Department of History, Faculty of Cultural Studies, Gadjah Mada University.

Listia, Laode Arham, and Lian Gogali. 2007. *Problematika pendidikan agama di sekolah: hasil penelitian tentang pendidikan agama di Kota Jogjakarta, 2004-2006*. Yogyakarta, Indonesia: Interfidei.

Maryono, Agus. 2013. "Demokrasi Dan Falsafah Hamemayu Hayuning Bawono Untuk Kelestarian Lingkungan Hidup." In *Sekolah Pascasarjana UGM*.

Mas'ood, Mohtar, S. Rizal Panggabean, and Azca, Muhammad Najib. 2007. "Sumber-sumber Sosial Bagi Sivilitas Dan Partisipasi: Kasus Yogyakarta, Indonesia." In *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*, edited by Robert W Hefner, 199-230. Yogyakarta: Impulse.

- Moedjanto, Gregorius. 1987. *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya Oleh Raja-Raja Mataram*. Yogyakarta: Kanisius.
- Newberry, Jan. 2013. *Back Door Java: Negara, Rumah Tangga, Dan Kampung Di Keluarga Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor dan KITLV-Jakarta.
- Pemkot Yogyakarta. 2002. "Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta Di Paseduluran Segoro Amarto." <http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/3096/semangat-gotong-royong-agawe-majune-ngayogyakarta-di-paseduluran-segoro-amarto.html>.
- Priyatmono, Gutomo. 2009. "Multikultur Sego Pecel." *Jalan Ketiga: Jurnal Multikulturalisme* 1: 93-97.
- Rosari, Aloysius Soni BL. de. 2011. *"Monarki Yogya" Inkonstitusional?* Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Salim, Hairus, Najib Kailani, and Nikmal Azekiyah. 2011. *Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi Dan Resistansi Di SMUN Di Yogyakarta*. Yogyakarta: CRCS dan LKiS.
- Santosa, Revianto B. 2002. "Menulis Yogya: Memumpun Makna, Merentang Cakrawala". Yogyakarta.
- Schwarz, Adam. 2000. *A Nation in Waiting Indonesia's Search for Stability*. Boulder, Colo.: Westview Press.
- Shidqi, Ahmad. 2008. *Tuban di dunia gemerlapku: sebuah buku reportase*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soemardjan, Selo. 2009. *Perubahan Sosial Di Yogyakarta*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Sri Sultan Hamengkubuwono X. 2013. *Pidato Kebudayaan: Membangun Yogyakarta Sebagai Rumah Bersama*. DVD. Yogyakarta: GKI Gejayan.
- Subkhan, Imam. 2007. *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme Di Yogya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sunardi, St. 2012. *Vodka dan birahi seorang "nabi": esai-esai seni dan estetika*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Surjomihardjo, Abdurrachman. 2008. *Kota Yogyakarta tempo doelo: sejarah sosial, 1880-1930*. Depok: Komunitas Bambu.
- Suryanto. 2013. "Warga Yogyakarta Ikrarkan Jogja Istimewa." Accessed September 9. www.antaraneews.com/berita/337384/warga-yogyakarta-ikrarkan-jogja-istimewa.
- Susanto, Andreas Ambrosius. 2008. "Under the Umbrella of the Sultan: Accomodation of the Chinese in Yogyakarta During Indonesia's New Order". PhD Dissertation, Nijmegen: Radboud University.

- Taylor, Charles. 2004. *Modern Social Imaginaries*. Durham, N.C.: Duke University Press.
- Tim Peneliti UIN Sunan Kalijaga. 2012. "Laporan Penelitian Ketahanan Kepribadian Mahasiswa DIY Terhadap Eksklusivisme Keagamaan: Studi Kasus Pada Enam Perguruan Tinggi Di Yogyakarta". Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Turner, Victor W. 1974. *Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Wahid, Fathul. 2013. "Translating the Idea of the eGovernment One-Stop-Shop in Indonesia." In *Information and Communication Technology: International Conference, ICT EurAsia 2013*, edited by Khabib Mustafa, Erich J. Neuhold, A Min Tjoa, Edgar Weippl, and Ilsun You, 1–10. Berlin: Springer.
- Wicoyo, Joko. 2011. "A Discourse: Naming Yogyakarta As The Veranda of Madinah." *Historia Vitae* 25 (2): 146–161.
- . 2013. "The Decline of Pluralism in Yogyakarta." *The Jakarta Post*, July 17, sec. Readers Forum. www.thejakartapost.com/news/2013/07/17/citizen-journalism-the-decline-pluralism-yogyakarta.html.